

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU 2019



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU 2019



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU 2019

No. Publikasi : **7472.2020**  
Katalog BPS : **4102004.7472**  
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : xiv +94 halaman

Naskah :  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Baubau

Gambar Cover :  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Baubau

Diterbitkan Oleh :  
© Badan Pusat Statistik Kota Baubau

Gambar Ilustrasi:  
Freepik.com  
Pngdownload.id

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU 2019

## **Tim Penyusun:**

Penanggung Jawab : Sudirman K, S.Pi., M.Si  
Penyunting : Anisa Noor Rosidah, S.Si  
Muhammad Imam Syafii, S.Tr, Stat  
Penulis : Fadhila Tsany Nur Rizky, S.ST  
Miftakhul Jannah, S.Tr. Stat  
Gambar Kulit : Fadhila Tsany Nur Rizky, S.ST

<https://baubaukota.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Baubau 2019** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Baubau. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Organisasi Perangkat Daerah terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan. Perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami menyadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini serta kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Baubau, Desember 2020  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Baubau



Sudirman K, S.Pi., M.Si





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>Daftar Gambar</b> .....	xi
<b>Singkatan dan Akronim</b> .....	xii
<b>Bab 1 Kependudukan</b> .....	1
<b>Bab 2 Kesehatan dan Gizi</b> .....	15
<b>Bab 3 Pendidikan</b> .....	27
<b>Bab 4 Ketenagakerjaan</b> .....	41
<b>Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi</b> .....	51
<b>Bab 6 Perumahan dan Lingkungan</b> .....	57
<b>Bab 7 Kemiskinan</b> .....	65
<b>Lampiran</b> .....	71
<b>Sumber Data</b> .....	91



<https://baubaukota.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Halaman

### KEPENDUDUKAN

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Baubau dan Rasio Jenis Kelamin, 2015-2019.....	6
1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Baubau Menurut Kecamatan, 2019.....	7
1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2015-2019.....	10
1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan,2018-2019.....	12
1.5 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur saat Perkawinan Pertama, 2017-2019 .....	13
1.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Pernah/Tidaknya Memakai Alat/Cara KB, 2017 – 2019 .....	14

### KESEHATAN DAN GIZI

2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Baubau, 2018-2019 .	19
2.2 Angka Kesakitan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Baubau, 2018- 2019 .	20
2.3 Persentase Penduduk umur 0-23 Bulan (Baduta) yang pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Jenis Kelamin, 2019.	21
2.4 Persentase Penduduk umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin, 2019.....	22
2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir menurut Tempat/Cara Berobat, 2019 .....	23
2.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan	



dalam Dua Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2018-2019.....	25
2.7 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin, 2018-2019.....	26

## **PENDIDIKAN**

3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Kota Baubau, 2015-2019 .....	33
3.2 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Status Pendidikan, 2019	35
3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Baubau Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin,2019.....	37
3.3 Perkembangan Rasio Murid-Guru, 2015/2016-2019/2020 Kota Baubau ...	39

## **KETENAGAKERJAAN**

4.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (jiwa), 2019.....	45
4.2 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Baubau, 2018.....	47
4.3 Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Penduduk Kota Baubau, 2019 .....	48

## **TARAF DAN POLA KONSUMSI**

5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2018 - 2019.....	54
5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang di Kota Baubau, 2018 -2019.....	56

## **PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN**

6.1 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018-2019.....	62
6.2 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Status Kepemilikan	



Rumah Tinggal Perumahan, 2018 -2019 .....	63
<b>KEMISKINAN</b>	
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Baubau, 2015-2019 .....	68
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Baubau, 2018-2019 .....	69

<https://baubaukota.bps.go.id>





## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1.1 Angka Beban Ketergantungan di Kota Baubau, 2015-2099 .....	8
1.2 Komposisi Penduduk Kota Baubau, 2019 .....	9
1.3 Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Status perkawinan, 2018-2019 .....	11
2.1 Angka Kesakitan Penduduk Kota Baubau (%), 2018 - 2019 .....	19
3.1 Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Baubau, 2015-2019 .....	31
3.2 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Baubau, 2015-2019 .....	32
3.2 Penduduk Usia 7-15 berdasarkan Status Pendidikan, 2015-2019.....	34



## SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka



# KEPENDUDUKAN 2019



Penduduk Laki-laki

**84.818**

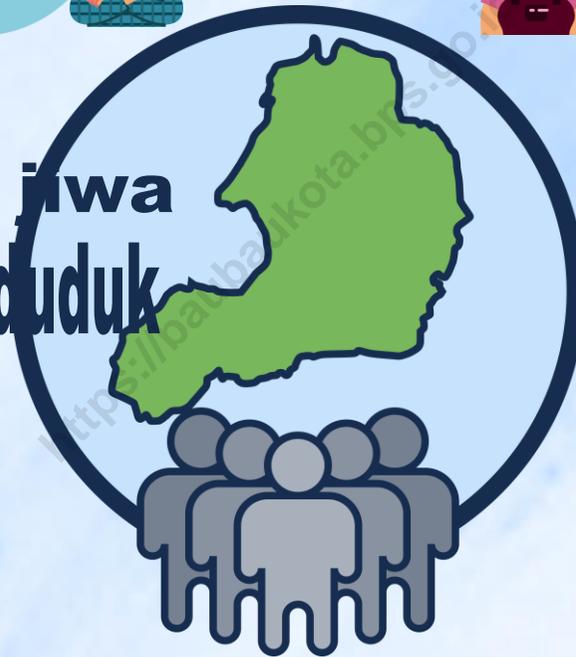


Penduduk Perempuan

**86.984**



**171.802 jiwa**  
**Jumlah Penduduk**



Penduduk Usia Produktif

**111.386**  
**jiwa**

Rasio Jenis Kelamin  
**97,51**  
**persen**

Penduduk Usia Tidak Produktif

**60.416**  
**jiwa**



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

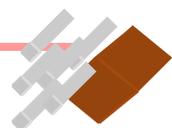
<https://baubaukota.bps.go.id>



Keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan selalu menjadi sorotan oleh berbagai pihak, begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya atau menurunnya angka pertumbuhan ekonomi secara langsung terkait dengan aspek kependudukan.

Dalam perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena penduduklah yang memiliki peran utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Selain itu, posisi penduduk bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan melainkan juga sebagai sasaran pembangunan itu sendiri. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia diperlukan karena jumlah penduduk yang besar merupakan modal atau aset pembangunan jika kualitasnya baik, sebaliknya hanya akan menjadi beban manakala kualitasnya rendah.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena demografi yang tidak terelakkan. Pertumbuhan penduduk menunjukkan penambahan jumlah penduduk karena kelahiran maupun migrasi. Penduduk yang semakin bertambah berpeluang menjadi sebuah potensi bagi suatu negara. Hal ini karena pertumbuhan penduduk ditinjau bukan hanya dari segi penambahan, tetapi dari perubahan struktur umur penduduk. Perubahan struktur umur penduduk merupakan hasil dari terjadinya transisi demografi, sedangkan pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya transisi demografi. Hubungan ini diungkapkan oleh *International Conference on Population and*



*Development's* (ICPD) yang berpendapat bahwa penduduk memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan mendukung percepatan transisi demografi.

Struktur umur penduduk muncul sebagai sebuah aspek yang penting karena struktur umur tersebut menggambarkan potensi ekonomi negara. Tren kependudukan di Indonesia menunjukkan pola meningkatnya jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), sehingga pada tahun 2030-2040 Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Para ekonom meyakini bahwa bonus demografi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, keberadaan penduduk dengan jumlah yang besar di suatu negara seringkali dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi di negara tersebut. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya yaitu tingginya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas,

*Kegunaan laju pertumbuhan penduduk adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.*



menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

### **Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk di Kota Baubau tahun 2019 tercatat 171.802 jiwa atau 6,35 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2.704.737 jiwa. Jumlah penduduk Kota Baubau mengalami penambahan kurang lebih 4.283 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 yang mencapai 167.519 jiwa. Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015, jumlah penduduk di Kota Baubau saat ini mengalami peningkatan kurang lebih 10,93 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu lima tahun terakhir di Kota Baubau telah mengalami pertambahan penduduk sebesar 16.925 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2019 tercatat sebesar 2,49 persen atau mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Tahun 2018, laju pertumbuhan penduduk Kota Baubau sebesar 2,55 persen.

*Pada tahun 2019 penduduk Kota Baubau sebesar 6,35 persen dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Kendari.*

**Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Baubau dan Rasio Jenis Kelamin, 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	154 877	2,01	97,34
2016	158 271	2,41	97,66
2017	162 780	2,50	97,53
2018	167 519	2,55	97,44
2019	171 802	2,49	97,51

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Baubau pada tahun 2019 sebesar 97,51. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 97 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Baubau lebih sedikit bila dibanding penduduk perempuan. Bila dilihat rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin terkecil terdapat di Kecamatan Murhum yaitu sebesar 97,95 persen sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Bungi yaitu 106,84 persen.

### Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kota Baubau. Distribusi penduduk yang

*Kecamatan Batupoaro merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Baubau yaitu 16.804 jiwa/Km<sup>2</sup>.*



tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

**Tabel 1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Baubau Menurut Kecamatan, 2019**

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)
Betoambari	607,62	12,56
Murhum	3 351,06	13,00
Batupoaro	16 804,16	17,87
Wolio	1 255,03	26,93
Kokalukuna	1 241,52	13,21
Sorawolio	77,85	5,51
Bungi	142,84	5,32
Lea-lea	266,41	5,56
<b>Baubau</b>	<b>582,39</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2035

Selama ini persebaran penduduk Baubau terkonsentrasi pada wilayah perkotaan. Kondisi tersebut tergambar pada Tabel 1.2. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa di beberapa kecamatan yang sebagian besar wilayah kelurahannya berstatus pedesaan memiliki kepadatan penduduk lebih rendah dibandingkan yang berstatus perkotaan. Dimana kecamatan yang memiliki sebagian besar kelurahannya berstatus



perdesaan adalah Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-lea, sedangkan kecamatan lainnya sebagian besar bahkan seluruh kelurahannya bersatatus perkotaan. Kecamatan Batupoaro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Baubau sekitar 16.804 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Sorawolio memiliki kepadatan paling rendah sekitar 77 jiwa per km<sup>2</sup>.

### Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Menurut United Nation (UN), angka beban ketergantungan menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (usia 0 -14) tahun dan jumlah penduduk tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Angka beban ketergantungan mengindikasikan dampak potensial dari perubahan struktur umur penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Karena angka beban ketergantungan menghubungkan kelompok yang kemungkinan besar menjadi kelompok bergantung secara ekonomi dengan kelompok yang kemungkinan besar menjadi kelompok yang aktif secara ekonomi, maka rasio tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan dukungan sosial.

Tingginya persentase angka beban ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang

Gambar 1.1 Angka Beban Ketergantungan Kota Baubau 2015-2019

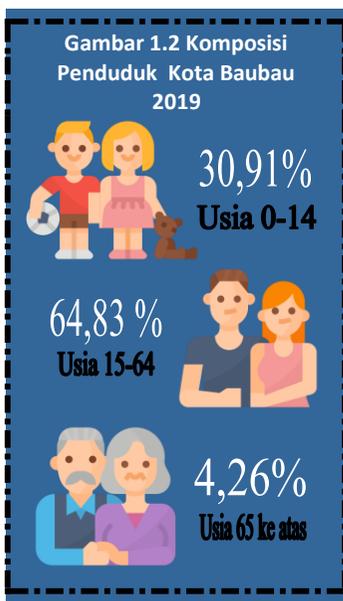


semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum dan tidak produktif lagi.

Selama periode 2015-2019 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka beban tanggungan di Kota Baubau sebesar 55,70 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55 penduduk usia belum dan tidak produktif. Sampai tahun 2019, angka beban tanggungan penduduk mengalami penurunan menjadi 54,24 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 54 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan diatas 65 tahun).

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka kategori usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 proporsi penduduk usia 0-14 ada sebanyak 31,90 persen



kemudian mengalami penurunan menjadi 31,65 persen pada tahun 2016 dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2019. Adapun proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari 2017-2019 secara berturut-turut yaitu 31,40 persen pada tahun 2017, 31,16 persen pada tahun 2018, dan 30,91 persen pada tahun 2019.

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2015-2019**

Tahun	0-14 Tahun (%)	15-64 Tahun (%)	65 Tahun + (%)	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	31,90	64,23	3,88	55,70
2016	31,65	64,39	3,96	55,30
2017	31,40	64,55	4,05	54,91
2018	31,16	64,69	4,15	54,58
2019	30,91	64,83	4,26	54,24

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Baubau selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Pada tahun 2015 penduduk usia produktif mencapai 64,23 persen kemudian terus meningkat menjadi 64,39 persen pada tahun 2016, 64,55 persen pada tahun 2017, 64,69 persen pada tahun 2018, dan 64,83 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kota Baubau menjadi sangat potensial



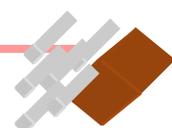
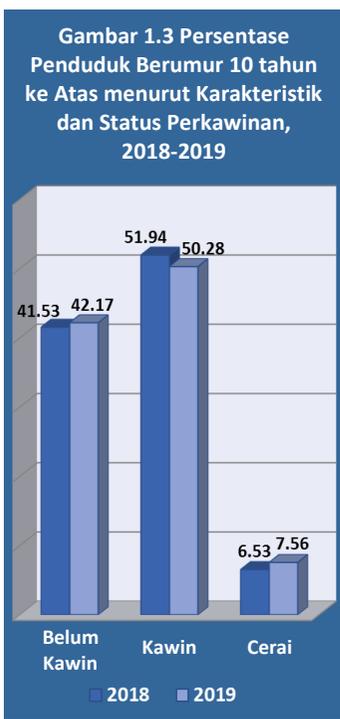
sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin meningkat dari 3,88 persen pada tahun 2015 menjadi 3,96 persen pada tahun 2016, 4,05 persen pada tahun 2017, 4,15 persen pada tahun 2018, dan 4,26 persen pada tahun 2019.

### Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Salah satu pemicu tingginya pertumbuhan penduduk suatu daerah yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Status perkawinan penduduk dapat dicermati berkaitan dengan potensinya dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk. Status perkawinan dapat dibedakan atas belum kawin, kawin, dan cerai.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 dan 2019, terdapat sedikit penurunan penduduk umur 10 tahun ke atas dengan status perkawinan kawin. Sedangkan pada status perkawinan belum kawin dan cerai mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019.

Selain komposisi penduduk menurut status perkawinan, status perkawinan penduduk perempuan pada kelompok umur 15-49 tahun juga penting untuk dicermati terkait dengan potensi perempuan pada kelompok umur tersebut untuk melahirkan. Sama halnya dengan yang ditunjukkan pada Gambar 1.3, pola yang sama terjadi pada komposisi penduduk perempuan umur 15-49 tahun menurut status perkawinan seperti ditunjukkan pada Tabel 1.4. Terjadi sedikit penurunan jumlah perempuan berumur 15-49 dengan status perkawinan



kawin pada tahun 2019, sedangkan pada status perkawinan belum kawin dan cerai mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

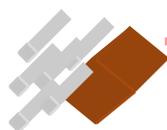
**Tabel 1.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan, 2018-2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Perkawinan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Belum Kawin	35,63	36,32
Kawin	60,78	58,44
Cerai	3,59	5,24

Indikator lain yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan adalah perempuan menurut umur perkawinan pertama. Hal ini dikarenakan banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang perempuan dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang perempuan untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu,



menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase perempuan yang melakukan perkawinan pertama sebelum berumur 19 tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 38,43 persen (2017), 29,29 persen (2018), dan 26,34 persen (2019) atau mengalami penurunan sebesar 9,14 persen pada tahun 2018 dan 2,95 persen pada tahun 2019. Pernikahan yang terjadi pada usia dini selain berpeluang meningkatkan jumlah kelahiran juga beresiko terhadap kondisi kesehatan dan psikologis perempuan.

**Tabel 1.5 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur saat Perkawinan Pertama, 2017-2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Umur saat kawin pertama (tahun)	2017	2018	2019
(1)	(2)	(2)	(4)
≤16	12,59	8,97	8,28
17-18	25,84	20,32	18,06
19-20	24,35	22,79	25,07
21+	37,23	47,91	48,59

Sedangkan persentase perempuan yang melakukan pernikahan pertamanya pada usia dewasa, lebih dari 21 tahun, mengalami peningkatan, yaitu sebesar 37,23 persen pada tahun 2017 menjadi 47,91 persen pada tahun 2018 dan 48,59 persen pada tahun 2019. Persentase perempuan

melaksanakan perkawinan pertama pada usia lebih dewasa erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan pemahaman akan perkawinan yang semakin baik.

### Pengguna Alat/Cara KB

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Sesuai visi BKKBN, program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Berdasarkan hasil susenas 3 tahun terakhir, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan sedang memakai alat/cara KB masih rendah dan cenderung menurun dari 43,09 persen pada tahun 2017, menjadi 35,44 persen pada tahun 2018 dan 30,28 persen pada tahun 2019.

**Tabel 1.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Pernah/Tidaknya Memakai Alat/Cara KB, 2017 – 2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tahun	Tidak Pernah Menggunakan	Pernah memakai alat/cara KB	
		Tidak sedang memakai alat KB	Sedang memakai alat KB
(1)	(2)	(2)	(4)
2017	33,22	23,69	43,09
2018	38,33	26,23	35,44
2019	46,66	23,06	30,28



# KESEHATAN DAN GIZI 2019

Persentase penduduk yang menggunakan  
jaminan kesehatan untuk berobat jalan



**70,95 Tahun**  
Angka Harapan Hidup

Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang  
sejak orang tersebut lahir



**17,45 persen**  
Angka Kesakitan (Morbiditas)

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://baubaukota.bps.go.id>

Indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah adalah tingkat kesehatan masyarakatnya. Kondisi kesehatan penduduk merupakan bagian yang sangat penting dari kesejahteraan masyarakat. Sejak awal pemerintah sangat memperhatikan dan berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat baik karena alasan kemanusiaan maupun karena keuntungan positif dari kesehatan, baik bagi individu masyarakat maupun untuk tujuan lain yang diinginkan masyarakat. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan produktivitas.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan, baik yang sifatnya promotif, preventif, maupun kuratif, antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih, dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Pemerintah khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan

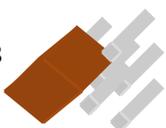
kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah; meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

### **Derajat dan Status Kesehatan Penduduk**

Kedaaan kesehatan penduduk dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai status kesehatan penduduk pada umumnya. Status kesehatan penduduk tergambar dari Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kesakitan (persentase penduduk yang mempunya keluhan kesehatan).

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata – rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat mencerminkan derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



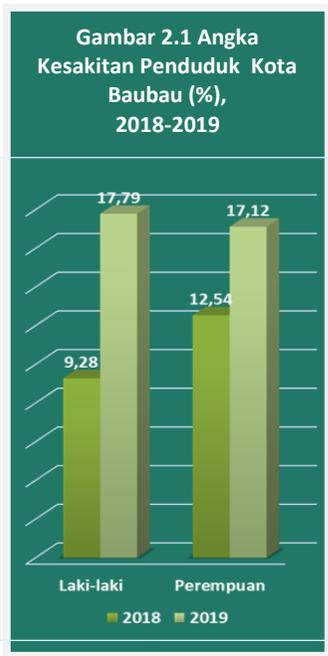
Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kota Baubau tahun 2019 relatif sama bila dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 70,72 tahun pada 2018 menjadi 70,95 tahun pada 2019. Hal ini dapat menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Kota Baubau.

Peningkatan Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan terakses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

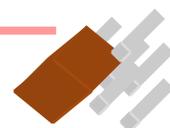
**Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Baubau, 2018 - 2019**

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)
(1)	(2)
2018	70,72
2019	70,95

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035



Tingkat kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari angka kesakitan (morbiditas). Angka kesakitan atau morbiditas merupakan rasio persentase antara jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya kegiatan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Angka kesakitan (morbiditas) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Semakin kecil Angka Kesakitan artinya semakin sedikit penduduk yang mengalami



keluhan kesehatan, sehingga dapat dimaknai semakin tinggi derajat kesehatan di wilayah tersebut apabila semakin kecil Angka Kesakitan/morbiditasnya.

Hasil Susenas tahun 2019 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Baubau mencapai 17,45 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 10,90 persen. Selain angka kesakitan lamanya sakit juga merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Meningkatnya angka morbiditas pada tahun 2019 dapat dikatakan terjadi berkurangnya kondisi kesehatan penduduk.

**Tabel 2.2 Angka Kesakitan Berdasarkan Jenis Kelamin di**

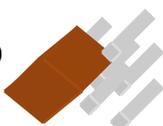
**Kota Baubau, 2018 - 2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan (%)	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Laki- laki	9,28	17,79
Perempuan	12,54	17,12
<b>Baubau</b>	<b>10,90</b>	<b>17,45</b>

### Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) selama dua tahun pertama usianya dan ASI. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang dapat diberikan secara eksklusif sampai dengan umur 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.



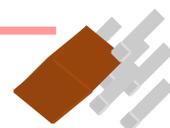
Tabel 2.3 menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen bayi berumur 0-23 bulan pernah diberi ASI dengan rata-rata lama pemberian ASI selama 9 bulan.

**Tabel 2.3 Persentase Penduduk umur 0-23 Bulan (Baduta) yang pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Jenis Kelamin, 2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Persentase Baduta Pernah diberi ASI	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)
(1)	(2)	(3)
Laki- laki	85,79	9
Perempuan	85,24	9
<b>Baubau</b>	<b>90,32</b>	<b>9</b>

Selain pemberian ASI, bayi perlu diberikan imunisasi untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuhnya terhadap penyakit. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang berbahaya, mengurangi resiko untuk sakit dan mencegah penularan penyakit tertentu terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil SUSENAS 2019, persentase balita di Kota Baubau yang mendapat imunisasi lengkap sebanyak 60,75 persen dengan persentase bayi laki – laki lebih tinggi dibanding bayi perempuan, yaitu 61,56 persen untuk bayi laki – laki dan 59,91 persen untuk bayi perempuan.



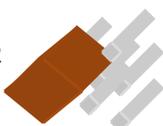
**Tabel 2.4 Persentase Penduduk umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin, 2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	89,04	61,56
Perempuan	84,77	59,91
<b>Baubau</b>	<b>86,94</b>	<b>60,75</b>

### Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Saat penduduk yang mengalami keluhan kesehatan memilih untuk menjalani pengobatan, maka pilihan fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kecenderungan penduduk memanfaatkan fasilitas kesehatan tertentu. Pemanfaatan fasilitas kesehatan umumnya berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi dan kondisi wilayah tempat tinggal penduduk. Perbedaan ketersediaan dan jarak menuju fasilitas kesehatan akan menentukan kualitas kesehatan penduduk suatu wilayah. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Baubau yang mengalami keluhan kesehatan memilih untuk berobat jalan di puskesmas atau pustu.

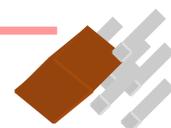


**Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir menurut Tempat/Cara Berobat, 2019**

Tempat/ cara berobat	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	6,63	4,28	5,35
RS Swasta	3,85	4,36	4,13
Praktek dokter/bidan	17,16	17,48	17,33
Klinik/praktek dokter bersama	5,16	2,78	3,87
Puskesmas/ pustu	69,59	70,53	70,10
Poskesdes/ polindes/ posyandu/ balai pengobatan	0,77	0,66	0,71
Praktek pengobatan tradisonal	2,35	3,83	3,15
Lainnya	-	-	-

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2019

Ketersediaan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Tercermin dari sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 dalam hal meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran minimal 1 puskesmas tiap kecamatan yang terakreditasi dan minimal 1 RSUD yang terakreditasi di setiap kab/kota.



Pada setiap Kecamatan di Kota Baubau rata-rata terdapat 2 puskesmas, kecuali Kecamatan Kokalukuna dan Kecamatan Betoambari yang memiliki 3 puskesmas. Sedangkan jumlah rumah sakit pemerintah/swasta sebanyak 5 unit yang tersebar di Kec. Murhum dan Kec. Wolio yang merupakan wilayah perkotaan. Keberadaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Baubau diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat seperti menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya persentase BBLR, meningkatkan upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan kegiatan promotif dan preventif serta meningkatnya upaya perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud.

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa.

Untuk memberi gambaran pelayanan kesehatan secara umum terhadap ibu dan anak, dapat digunakan indikator persentase perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang dua tahun lalu atau kurang, melahirkan anak lahir hidup yang terakhir menurut penolong kelahiran terakhir seperti ditunjukkan

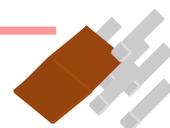
pada Tabel 2.6. usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang sangat baik, dapat diamati bahwa penolong kelahiran terakhir terhadap lebih dari 90 persen perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang dua tahun lalu atau kurang, melahirkan anak lahir hidup yang terakhir adalah dokter kandungan dan bidan.

**Tabel 2.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2018-2019**

Penolong proses kelahiran anak lahir hidup yang terakhir	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Dokter Kandungan	24,94	20,46
Dokter Umum	1,42	-
Bidan	66,40	69,54
Tenaga kesehatan lainnya	-	3,40
Dukun beranak/ paraji/lainnya	7,24	-

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2019

Jaminan kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

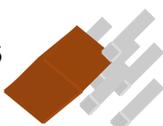


Tahun 2019 persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase penduduk laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2019 lebih tinggi dari penduduk perempuan, yaitu sebesar 34,75 persen sedangkan perempuan 27,23 persen

**Tabel 2.7 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin, 2018-2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan	
	2018	2019
(1)	(2)	(2)
Laki- laki	64,18	34,75
Perempuan	59,28	27,23
<b>Baubau</b>	<b>61,85</b>	<b>30,65</b>

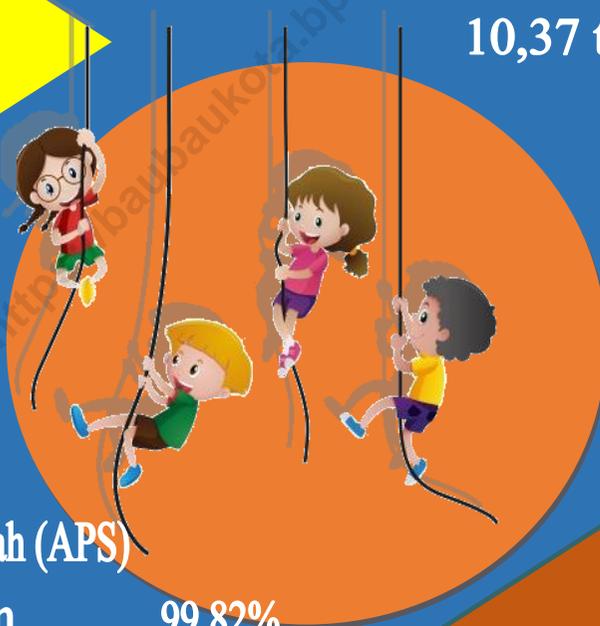


# PENDIDIKAN 2019



Harapan Lama Sekolah  
**14,81 tahun**

Rata-rata Lama Sekolah  
**10,37 tahun**



Angka Partisipasi Sekolah (APS)

7 -12 tahun 99,82%

13 -15 tahun 96,95 %

16 -18 tahun 80,51 %

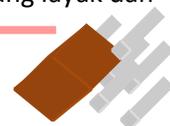
Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://baubaukota.bps.go.id>

Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Adanya tujuan ini diharapkan agar mereka yang memperoleh pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Hal ini bersesuaian dengan UU No.2 Tahun 1985 yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang baik, dan bertanggung jawab terhadap bangsa.

Pendidikan juga menjadi hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memiliki pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan

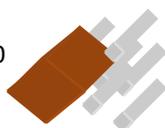


bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

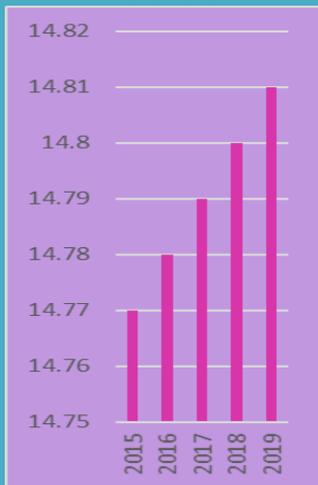
*Dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar.*



Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, dan Rasio Murid Guru serta Rasio Murid Kelas.

## Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

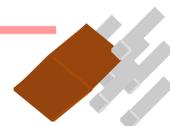
Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk Kota Baubau, 2015-2019



Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk usia tujuh tahun keatas. Hubungan keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut “jika kebijakan bidang



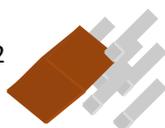
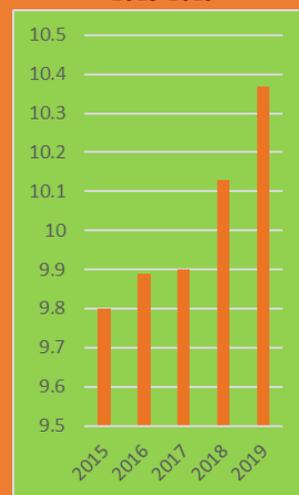
pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan”. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Baubau pada tahun 2015-2019 relatif sama dengan pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 0,07 persen. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Baubau di tahun 2019 sendiri sebesar 14,81 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata seorang anak yang berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 15 tahun atau setara dengan Diploma III.

Dibandingkan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, angka HLS Kota Baubau menempati urutan ke-2 dari 17 kabupaten/kota. Nilai HLS Kota Baubau juga lebih tinggi dibandingkan HLS Sulawesi Tenggara yang mencapai 13,55 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Baubau mampu meningkatkan harapan sekolah penduduk hingga jenjang perguruan tinggi yang juga secara langsung menunjukkan perbaikan kualitas pendidikan di Kota Baubau.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Kota Baubau, 2015-2019



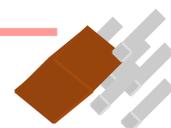
RLS digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS Kota Baubau di tahun 2019 tercatat 10,37 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menempuh pendidikan sampai kelas X (SMA kelas 1). Dilihat dari *trend*-nya, selama tahun 2015-2019 angka RLS Kota Baubau terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan angka RLS tahun 2015 hingga 2019 yang berturut-turut bernilai 9,80 tahun, 9,89 tahun, 9,9 tahun, 10,13 tahun dan 10,37 tahun. Angka ini mengandung arti bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di kelima tahun tersebut menempuh pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas 1). RLS Kota Baubau sendiri menempati urutan ke-2 dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Nilai RLS Kota Baubau juga lebih tinggi dibandingkan RLS Sulawesi Tenggara yang mencapai angka 8,91 tahun.

**Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Kota Baubau, 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,77	14,78	14,79	14,80	14,81
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,80	9,89	9,90	10,13	10,37

## Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi dapat memiliki pe-

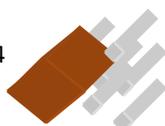


ngetahuan yang lebih luas serta memiliki keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan semakin tinggi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Hal ini juga dapat berguna dalam menurunkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Berbagai penelitian membuktikan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat menjadi salah satu cara dalam memutus rantai kemiskinan. Jika tingkat pendidikan seseorang rendah, maka ia akan sulit untuk berkompetisi dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal ini tentunya memperbesar peluang untuk menjadi miskin. Selanjutnya, keluarga yang cenderung miskin akan memiliki pengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya dikarenakan pendidikan bukanlah sesuatu yang diprioritaskan bagi mereka. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka generasi selanjutnya akan memiliki peluang yang besar menjadi miskin juga.

Tingkat pendidikan penduduk harus dipandang sebagai suatu usaha yang bertujuan dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan. Hal ini tentunya perlu strategi khusus di bidang pendidikan. Kebijakan dan tindakan riil dari pemerintah dalam meningkatkan pendidikan diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk.

Gambar 3.3 Penduduk Usia 7-15 Berdasarkan Status Pendidikan, 2019



**Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Status Pendidikan, 2019**

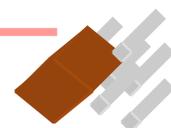
Karakteristik	Tidak/ Belum Pernah Berse- kolah	Masih Bersekolah			Tidak Berseko- lah Lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jenis Kelamin</b>						
<b>Laki-Laki</b>	0,44	37,19	14,44	26,12	21,80	100,00
<b>Perempuan</b>	1,07	33,55	15,53	25,62	24,23	100,00
<b>Kota Baubau</b>	0,76	35,34	14,99	25,86	23,04	100,00

Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa masih ada 0,76 persen penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan ada 23,04 persen yang tidak bersekolah lagi. Hal ini menandakan bahwa kesadaran penduduk Kota Baubau untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih kurang, sehingga sangat diharapkan partisipasi aktif dalam menempuh pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Baubau.

### Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah.

*Pada tingkat pendidikan SMP/MTSI, dan SMA/SMK/MA APM penduduk laki-laki di Kota Baubau lebih besar bila dibandingkan dengan APM perempuan.*



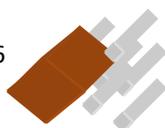
Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA.

Pada tahun 2019, APS Kota Baubau untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,82 persen, artinya setiap 100 anak usia 7-12 tahun, terdapat satu anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi (*drop out*). APS untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,95 persen, dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 80,51 persen. Dari ketiga kelompok umur tersebut, partisipasi sekolah tertinggi ada pada kelompok umur 7-12 tahun..

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, nilai APS penduduk perempuan di masing-masing kelompok umur lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Untuk kelompok umur 7-12 tahun, nilai APS perempuan bahkan mencapai 100 persen, yang artinya tidak ada anak dengan jenis kelamin perempuan yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi.

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Misalnya, APS pada jenjang usia 7-12 tahun mengabaikan



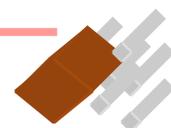
informasi anak berusia 12 tahun yang bersekolah pada kelas VII. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) lebih relevan.

APM mengindikasikan proporsi anak usia sekolah yang dapat sekolah tepat waktu. Di tahun 2019, nilai APM Kota Baubau untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah 99,41 persen, untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat adalah 80,93 persen, dan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat adalah 71,47 persen. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Baubau Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Indikator Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7-12 tahun	99,64	100,00	99,82
13-15 tahun	95,94	98,04	96,95
16-18 tahun	74,49	81,62	80,51
APM			
- SD/MI	99,64	99,17	99,41
- SMP/MTs	78,36	83,68	80,93
- SMA/SMK/MA	74,87	67,79	71,47

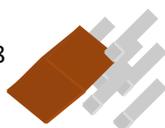


Jika dilihat dari jenis kelamin, nilai APM untuk jenis kelamin laki-laki secara umum lebih tinggi kecuali pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, nilai APM untuk jenis kelamin perempuan sebesar 80,68 sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 78,36 persen. Hal ini disebabkan pada usia jenjang pendidikan SMP/ sederajat, laki-laki cenderung untuk lebih mencari pekerjaan daripada melanjutkan sekolah. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait akses pendidikan menengah dan tinggi yang capaiannya belum bisa setinggi pendidikan dasar.

### **Kualitas Pelayanan Pendidikan**

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru dan rasio murid-kelas.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran.



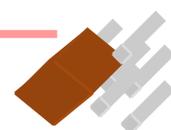
Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

**Tabel 3.4 Perkembangan Rasio Murid-Guru, 2015/2016-2019/2020  
Kota Baubau**

Tahun	Rasio Murid-Guru		
	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2015/2016	13	10	11
2016/2017	35	10	9
2017/2018	12	12	11
2018/2019	16	11	12
2019/2020	16	12	13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau

Pada jenjang pendidikan SD/MI di tahun 2019, seorang guru rata-rata mengajar 16 murid dengan daya tampung mencapai 247 murid per sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, seorang guru rata-rata mengajar 12 murid dengan daya tampung mencapai 301 murid per sekolah. Adapun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, seorang guru rata-rata mengajar 13 murid dengan daya tampung mencapai 461 murid per sekolah.





# KETENAGAKERJAAN 2019



Angkatan Kerja  
79.064 orang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
66,12 %

Bukan Angkatan Kerja  
40.506 orang



Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan

◆ Bekerja 74.444 orang

◆ Pengangguran Terbuka 4.620 orang

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://baubaukota.bps.go.id>

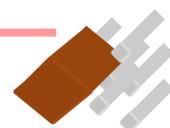
Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerjaan merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang penting bagi pembangunan ekonomi. Sektor ini berguna membantu pemerintah dalam upaya mengurangi penduduk miskin dengan menitik beratkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya terus bertambah. Hal ini tentunya diperlukan strategi bagi pemerintah dalam hal pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja dan sejauh mana pemerintah menjalankan strategi yang diambil dengan seefektif mungkin.

Pentingnya peranan tenaga kerja dalam proses rutin dan pertumbuhan ekonomi saling berhubungan satu sama lain. Sisi yang satu mengambil peranan fungsional dalam proses produksi yaitu bertindak sebagai faktor produksi. Adapun sisi lain merupakan terminal dari semua kegiatan produksi yaitu sebagai konsumen penerima pendapatan yang bersumber dari proses produksi.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting bukan hanya untuk mencapai kepuasan individu, melainkan juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Bagi suatu kelompok masyarakat utamanya yang sudah memasuki usia kerja diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang tentunya akan berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan



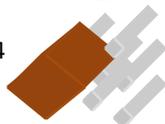
kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2019. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama serta jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan.

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).



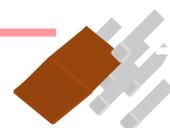
TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

**Tabel 4.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (jiwa), 2019**

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Ketenagakerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	44805	34259	79064
<b>1.Bekerja</b>	41789	32655	74444
<b>2.Pengangguran</b>	3016	1604	4620
%Bekerja terhadap Angkatan Kerja	93.27	95.32	94.16
TPAK (%)	77.22	55.66	66.12
TPT (%)	6.73	4.68	5.84

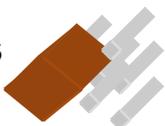


Jumlah angkatan kerja di Kota Baubau di tahun 2019 mencapai 79.064 jiwa dengan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 94,16 persen. TPAK Kota Baubau mencapai 66,12 persen yang artinya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian di Kota Baubau semakin tinggi. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK untuk jenis kelamin laki-laki mencapai 77,22 persen sedangkan TPAK untuk jenis kelamin perempuan mencapai 55,66 persen. Ini mengindikasikan bahwa pasokan tenaga kerja untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan.

TPT Kota Baubau di tahun 2019 mencapai 5,84 persen dengan nilai TPT untuk jenis kelamin laki-laki mencapai 6,73 persen dan jenis kelamin perempuan mencapai 4,68 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak yang tidak terserap pada pasar kerja dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Jumlah angkatan kerja yang meningkat diiringi dengan TPT yang meningkat disebabkan karena belum mempunyai lapangan pekerjaan di Kota Baubau untuk menampung seluruh angkatan kerja.

### Lapangan Usaha

Dilihat dari jenis kelamin, semua sektor lapangan usaha masih didominasi oleh pekerja laki-laki. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada sektor pertanian, jumlah pekerja laki-laki sebanyak 5.877 jiwa atau sebesar 66,13 persen dari total pekerja di sektor pertanian. Sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 3.010 jiwa atau sebesar 33,87 persen. Pada sektor manufaktur, jumlah pekerja laki-laki sebanyak 7.521 jiwa atau sebesar 61,29



persen dari total pekerja di sektor manufaktur, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 4.750 jiwa atau sebesar 38,71 persen. Adapun di sektor jasa, jumlah pekerja laki-laki sebanyak 28.391 jiwa atau sebesar 53,28 persen dari total pekerja di sektor jasa, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 24.895 jiwa atau sebesar 46,72 persen.

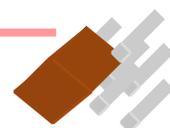
**Tabel 4.2 Persentase Penduduk Kota Baubau Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2019**

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Jenis Kelamin	Lapangan Usaha 3 Kategori			Total
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	
Laki-laki	5877	7521	28391	41789
Perempuan	3010	4750	24895	32655
<b>Total</b>	8887	12271	53286	74444

Catatan : Cakupan lapangan usaha Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Cakupan lapangan usaha Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan. Cakupan lapangan usaha Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.

Berdasarkan status pekerjaan utama, 53,28 persen penduduk Kota Baubau termasuk pekerja dalam sektor formal, sisanya 46,72 persen termasuk pekerja dalam sektor informal. Jika dirinci dari 53,28 persen pekerja sektor formal, 48,90 persen penduduk Kota Baubau berstatus buruh/karyawan/pegawai, dan 4,38 persen sisanya berstatus berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Adapun 46,72 persen pekerja dalam sektor informal, 23,04 persen berstatus berusaha sendiri, 10,68 persen berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, 0,36 persen berstatus pekerja bebas pertanian, 2,08 persen berstatus pekerja



bebas non-pertanian, dan sisanya 10,56 persen berstatus pekerja keluarga/ tak dibayar.

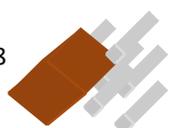
## Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Setiap orang berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Sebagian besar angkatan kerja di Kota Baubau di tahun 2019 memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Sebanyak 28,01 persen angkatan kerja di Kota Baubau memiliki tingkat pendidikan SMA dan 22,86 persen memiliki tingkat pendidikan universitas. Akan tetapi, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD masih cukup banyak di Kota Baubau dengan persentase sebesar 21,71 persen.

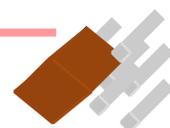
**Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Penduduk Kota Baubau, 2019**

Tingkat Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah
SD	16085	1080	17165
SMP	8847	364	9211
SMA	20460	1684	22144
SMK	8344	369	8713
Diploma I/II/III	3578	178	3756
Universitas	17130	945	18075
<b>Jumlah</b>	<b>74444</b>	<b>4620</b>	<b>79064</b>



Jika dirinci berdasarkan angkatan kerja yang bekerja, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMA dan Universitas dengan persentase masing-masing sebesar 27,48 persen dan 23,01 persen. Akan tetapi, tingkat pendidikan SD juga mendominasi penduduk Kota Baubau yang bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pekerja di Kota Baubau yang memiliki pendidikan rendah. Tentunya dengan pendidikan yang rendah tersebut mengakibatkan masih banyak penduduk Kota Baubau yang bekerja di sektor informal.

Dilihat dari angkatan kerja yang pengangguran, masih banyak penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan universitas yang pengangguran dengan persentase masing-masing sebesar 36,45 persen dan 20,45 persen. Selain itu, penduduk dengan tingkat pendidikan SD juga menempati urutan kedua tertinggi yang persentase penganggurannya cukup tinggi. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi pemerintah Kota Baubau dalam menyediakan lapangan kerja agar dapat lebih banyak menyerap angkatan kerja yang pengangguran.



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://baubaukota.bps.go.id>

# TARAF DAN POLA KONSUMSI 2019



Rata-Rata Pengeluaran per Kapita/Bulan Rp. 1.131.250,-

**Konsumsi Non Makanan  
Per Kapita/Bulan**

**Rp. 724.526,-**



**Konsumsi Makanan  
per Kapita/Bulan**

**Rp. 432.509,-**

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

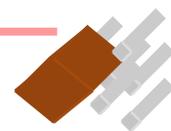
<https://baubaukota.bps.go.id>

Keberagaman konsumsi makanan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Secara umum gaya hidup masyarakat perkotaan (*urban lifestyle*) bercirikan lebih banyak pengeluaran pendapatan untuk konsumsi sektor non makanan, sedangkan masyarakat perdesaan bercirikan konsumsi di sektor makanan lebih tinggi daripada sektor non makanan.

### **Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya



## TARAF DAN POLA KONSUMSI

elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

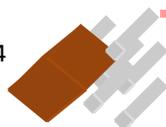
Kedadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kota Baubau, 2018 - 2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

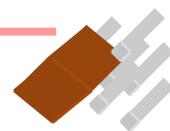
Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	445 614	432 509	39,39	37,38
Bukan Makanan	685 635	724 526	60,61	62,62
Perumahan	316 342	368 552	27,96	31,85
Barang dan Jasa	139 660	152 524	12,35	13,18
Pakaian	34 152	37 791	3,02	3,27
Barang Tahan Lama	134 296	97 620	11,87	8,44
Lainnya	61 185	68 039	5,41	5,88
<b>Jumlah</b>	<b>1 131 250</b>	<b>1 157 035</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Selama tahun 2019 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Baubau bila dibandingkan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 25.785 atau sebesar 2,30 persen atau dari Rp. 1.131.250,- menjadi Rp 1.157.035,-.



Dari Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa pada dua tahun terakhir pengeluaran penduduk lebih banyak digunakan untuk konsumsi bukan makanan daripada untuk makanan. Hal tersebut mencerminkan ciri dari pola konsumsi masyarakat perkotaan. Pengeluaran makanan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,01 persen, sedangkan pengeluaran non makanan mengalami kenaikan sebesar 2,01 persen, bila dilihat dari nilai rupiah yang dibelanjakan mengalami penurunan dari Rp. 445.614, - perkapita per bulan pada tahun 2018 menjadi Rp. 432.509,- perkapita per bulan di tahun 2019. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan mengalami peningkatan dari Rp. 685.635,- per kapita per bulan menjadi Rp. 724.526,- per kapita per bulan. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada komponennya perumahan, barang dan jasa, pakaian serta lainnya ( pajak, asuransi, keperluan pesta dan upacara)

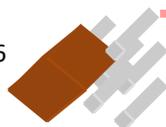
Pada Tabel 5.2 disajikan pula data rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan menurut kelompok barang pada tahun 2018-2019. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 rata-rata pengeluaran terbesar digunakan untuk membeli makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 27,28 persen, kemudian diikuti oleh pengeluaran untuk konsumsi komoditas padi-padian sebesar 14,69 persen, konsumsi komoditas ikan sebesar 13,92 persen, konsumsi rokok dan tembakau sebesar 11,48 persen, sisanya 32,63 persen untuk konsumsi komoditas telur dan susu, sayur-sayuran buah-buahan, umbi-umbian, daging, kacang-kacangan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, dan bahan makanan lainnya.



**Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang di Kota Baubau, 2018 -2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

<b>Kelompok Barang</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
A. Padi-padian	64 870	63 537
B. Umbi-umbian	3 682	1 975
C. Ikan	64 853	60 197
D. Daging	4 947	6 775
E. Telur dan Susu	31 984	32 838
F. Sayur - sayuran	27 041	25 260
G. Kacang - kacang	4 225	4 076
H. Buah -buahan	25 694	34 700
I. Minyak dan kelapa	8 132	7 619
J. Bahan Minuman	10 244	9 686
K. Bumbu-bumbuan	10 051	10 038
L. Bahan Makanan Lainnya	9 788	8 170
M. Makanan dan Minuman Jadi	141 768	117 997
N. Rokok dan Tembakau	38 334	49 641
<b>Total</b>	<b>445 614</b>	<b>432 509</b>



# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN 2019



Jumlah Rumah Tangga **36.711**



**Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/dll**

**Leding**  
49,58%

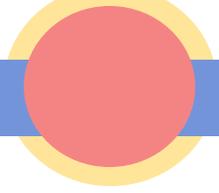
**Sumur/mata air terlindung**  
19,86%

**Sumur bor/pompa**  
29,13%

**Sumur/mata air tak terlindung**  
1,28%

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

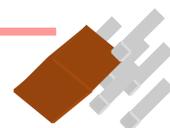
<https://baubaukota.bps.go.id>



Rumah tinggal yang dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat

*UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.*

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik peran maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.



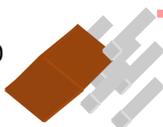
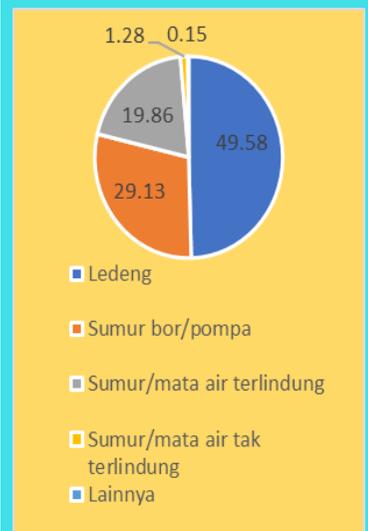
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup> (BPS, 2001).

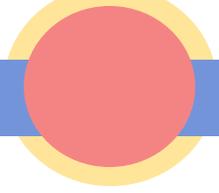
### Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2019, sekitar 98,57 persen rumah tangga di Kota Baubau telah mengakses air bersih, yaitu air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik)  $\geq 10$ .

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air untuk Mandi/Cuci/dll 2019





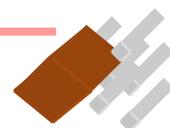
Hasil SUSENAS 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara menggambarkan bahwa 42,24 persen rumah tangga menggunakan sumur/ air terlindung. Untuk memasak/mandi/cuci /dll

Persentase tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan data tahun 2018 yang mencapai 97,18 persen.

Hasil Susenas 2019 juga menunjukkan bahwa rumah tangga di Kota Baubau menggunakan sumber air untuk memasak/mandi/cuci/dll dari sumber air leding sebesar 49,58 persen, dari sumur bor/pompa sebesar 29,13 persen, dari sumur/mata air terlindung sebesar 19,86 dari sumur/mata air tak terlindung sebesar 1,28 persen dan 0,15 persen dari sumber lainnya.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2019, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik, SPAL mencapai 78,85 persen atau mengalami peningkatan sebesar 10,95 persen bila dibandingkan tahun 2018 . Sedangkan sisanya 21,15 persen tempat akhir pembuangan kotoran di dalam lubang tanah, laut, dll.



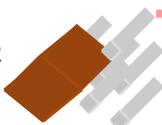
**Tabel. 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018-2019**

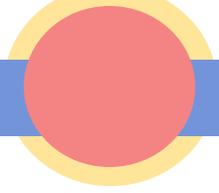
[Diolah dari Hasil Susenas]

Fasilitas Perumahan	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Jamban sendiri	72,55	78,25
- Jamban dengan tangki septik, SPAL	64,80	78,85
- Lainnya	35,20	21,15

### Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



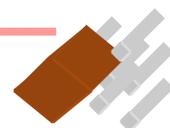


**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2018 - 2019**

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Peran	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	66,82	68,34
Lainnya	33,18	31,66

Berdasarkan hasil Susenas 2019, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 68,34 atau meningkat sebesar 1,52 persen bila dibandingkan tahun lalu. Sedangkan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri (kontrak/sewa/beas sewa/ rumah dinas/lainnya) sebesar 31,66 persen.



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://baubaukota.bps.go.id>

# KEMISKINAN 2019



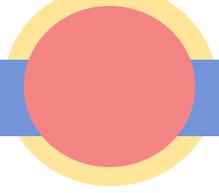
Penduduk Miskin  
12,42 ribu jiwa



Rp. 329.977,-  
Garis Kemiskinan

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://baubaukota.bps.go.id>



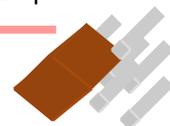
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Baubau. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

*Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik.*

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

## **Perkembangan Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin di Kota Baubau mengalami penurunan selama periode 2015-2019. Tahun 2015, jumlah penduduk miskin sebesar 14,29 ribu jiwa atau 9,24 persen dari



jumlah seluruh penduduk di Kota Baubau pada tahun tersebut. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan sampai pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi 12,42 ribu jiwa atau 7,27 persen dari jumlah penduduk tahun 2019.

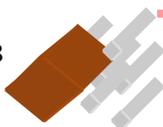
**Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Baubau, 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2015	14,29	9,24
2016	13,87	8,76
2017	13,55	8,39
2018	12,59	7,57
2019	12,42	7,27

Catatan : Data kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret

### **Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>), Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)**

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Baubau mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2015-2019. Garis kemiskinan pada tahun 2017 mencapai Rp. 297.991,- per kapita/bulan dan meningkat menjadi Rp. 311.509,- per kapita/bulan di tahun 2018.



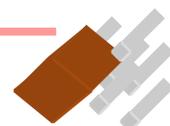
Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai  $P_1$  yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan nilai  $P_1$  yang semakin besar menunjukkan beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin berat.

$P_1$  pada tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2018 dari 1,00 menjadi 1,05 hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh bila dibandingkan dengan tahun 2018.

**Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Baubau, 2017 -2018**

Indikator	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bulan)	311 509	329,977
Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )	1,00	1,05
Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )	0,22	0,28

Sumber : BPS



Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.  $P_2$  tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018 dari 0,22 menjadi 0,28. Hal ini menyiratkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar bila dibandingkan tahun lalu.

Dari Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) dan Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) tahun 2019 dapat digambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Baubau pada tahun 2019 cenderung makin menjahui garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar bila dibandingkan tahun 2018. Kondisi di atas mengindikasikan bahwa terjadinya kenaikan ketimpangan pendapatan yang diterima kelompok penduduk miskin dan terjadi pula kenaikan besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan.

# LAMPIRAN

<https://baubaukota.bps.go.id>

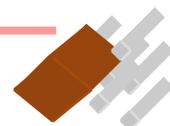
Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://baubaukota.bps.go.id>

## I

## (1) Indikator Kependudukan

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Betoambari	19 839	1,28	12,56	607,62	101,34
Murhum	20 542	-0,27	13,00	3 351,06	97,95
Batupoaro	28 231	-1,05	17,87	16 804,16	98,00
Wolio	42 533	0,28	26,93	1 255,03	99,09
Kokalukuna	20 870	0,05	13,21	1 241,52	102,16
Sorawolio	8 703	1,19	5,51	77,85	101,50
Bungi	8 412	1,50	5,32	142,84	106,84
Lea-lea	8 781	1,26	5,56	266,41	102,04
<b>Baubau</b>					
Hasil Registrasi	157 911	0,22	100	535,30	96,32
Hasil Proyeksi	171 802	2,55	100	582,39	97,51

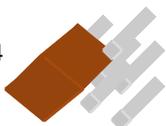


## I

### (2) Indikator Kependudukan

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kelompok Umur	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa), 2019		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	9 263	8 961	18 224
5-9	9 055	8 677	17 732
10-14	8 910	8 235	17 145
15-19	9 090	9 426	18 516
20-24	8 911	9 020	17 931
25-29	6 978	7 140	14 118
30-34	5 908	6 215	12 123
35-39	5 226	5 712	10 938
40-44	5 166	5 356	10 522
45-49	4 623	4 850	9 473
50-54	3 949	3 906	7 855
55-59	2 719	3 100	8 519
60-64	1 926	2 165	4 091
65-69	1 410	1 592	3 002
70-74	809	1 008	1 817
75+	875	1 621	2 496
<b>Baubau</b>	<b>84 818</b>	<b>86 984</b>	<b>171 802</b>



## II

## (1) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

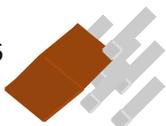
Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Buton	67,60	67,92
Muna	69,77	70,18
Konawe	69,76	70,02
Kolaka	70,38	70,72
Konawe Selatan	70,24	70,52
Bombana	68,17	68,54
Wakatobi	69,85	70,13
Kolaka Utara	69,94	70,15
Buton Utara	70,56	70,75
Konawe Utara	68,95	69,23
Kolaka Timur	71,99	72,33
Konawe Kepulauan	68,06	68,25
Muna Barat	69,97	70,16
Buton Tengah	67,33	67,50
Buton Selatan	67,33	67,50
Kendari	73,26	73,52
Baubau	70,72	70,96
Sulawesi Tenggara	70,72	70,97

## II

## (2) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan, 2019	
	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Buton	17,91	18,81
Muna	18,25	21,29
Konawe	18,95	21,76
Kolaka	13,88	13,80
Konawe Selatan	17,07	18,59
Bombana	11,95	12,73
Wakatobi	7,98	12,42
Kolaka Utara	13,49	13,48
Buton Utara	14,05	14,31
Konawe Utara	14,08	15,12
Kolaka Timur	13,51	14,78
Konawe Kepulauan	12,15	16,51
Muna Barat	20,59	18,78
Buton Tengah	8,68	9,44
Buton Selatan	18,16	21,30
Kendari	9,67	11,27
Baubau	17,79	17,12
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>14,62</b>	<b>13,01</b>

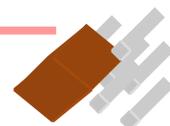


## II

## (3) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran di Provinsi Sulawesi Tenggara (%), 2019	
	Tenaga Kesehatan	Bukan Tenaga Kesehatan
(1)	(2)	(3)
Buton	99,42	0,58
Muna	100,00	-
Konawe	100,00	-
Kolaka	100,00	-
Konawe Selatan	100,00	-
Bombana	100,00	-
Wakatobi	100,00	-
Kolaka Utara	98,87	1,13
Buton Utara	100,00	-
Konawe Utara	99,61	0,39
Kolaka Timur	98,08	1,92
Konawe Kepulauan	100,00	-
Muna Barat	100,00	-
Buton Tengah	99,71	0,29
Buton Selatan	100,00	-
Kendari	100,00	-
Baubau	100,00	-
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>99,77</b>	<b>0,23</b>

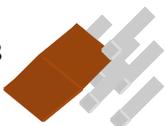


## III

## (1) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Buton	13,53	13,74
Muna	13,77	13,78
Konawe	12,98	12,99
Kolaka	12,39	12,80
Konawe Selatan	12,23	12,24
Bombana	11,82	11,83
Wakatobi	13,15	13,20
Kolaka Utara	12,09	12,10
Buton Utara	12,74	12,75
Konawe Utara	12,33	12,54
Kolaka Timur	11,89	12,15
Konawe Kepulauan	11,59	11,81
Muna Barat	12,13	12,20
Buton Tengah	12,35	12,70
Buton Selatan	12,56	12,94
Kendari	16,20	16,28
Baubau	14,80	14,81
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>13,53</b>	<b>13,55</b>

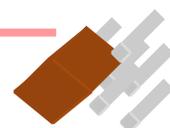


## III

## (2) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Buton	7,50	7,51
Muna	8,19	8,35
Konawe	8,94	9,14
Kolaka	8,57	8,78
Konawe Selatan	7,73	7,74
Bombana	7,54	7,74
Wakatobi	7,72	7,73
Kolaka Utara	7,67	7,86
Buton Utara	8,54	8,75
Konawe Utara	8,81	8,97
Kolaka Timur	7,18	7,35
Konawe Kepulauan	9,17	9,18
Muna Barat	6,76	6,77
Buton Tengah	7,28	7,29
Buton Selatan	7,07	7,32
Kendari	11,69	11,94
Baubau	10,13	10,37
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>8,69</b>	<b>8,91</b>



## III

### (3) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	SD		SMP		SMA	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	100,00	99,60	75,68	77,19	68,71	70,45
Muna	98,02	98,17	77,99	84,96	71,97	76,80
Konawe	99,18	97,23	76,70	74,63	64,45	51,98
Kolaka	99,74	100,00	73,56	68,78	60,75	62,76
Konawe Selatan	98,17	96,97	75,60	69,57	58,28	63,93
Bombana	98,37	99,10	75,47	71,15	58,86	73,62
Wakatobi	97,48	97,69	76,06	77,78	62,31	63,79
Kolaka Utara	98,16	97,95	73,00	75,42	52,21	53,35
Buton Utara	96,80	96,72	82,46	87,36	57,17	56,96
Konawe Utara	99,19	98,79	79,90	80,68	53,91	57,06
Kolaka Timur	96,13	98,07	74,68	71,27	63,98	73,89
Konawe Kepulauan	99,58	99,33	88,42	88,45	63,27	71,25
Muna Barat	98,04	97,58	84,87	91,04	71,50	82,79
Buton Tengah	90,35	94,42	82,93	93,62	80,15	88,25
Buton Selatan	97,95	98,53	87,71	91,49	44,10	41,16
Kendari	93,65	95,24	69,06	67,98	58,65	61,76
Baubau	99,60	99,17	81,62	83,68	70,20	67,79
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>97,51</b>	<b>97,69</b>	<b>76,64</b>	<b>76,67</b>	<b>62,87</b>	<b>64,98</b>



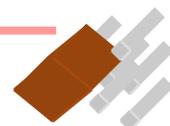


## (4) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Laki-laki+Perempuan

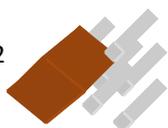
Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	7-12		13-15		16-18	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton		99,05		98,24		82,59
Muna		98,09		96,66		81,46
Konawe		99,55		92,69		70,28
Kolaka		99,58		95,70		71,05
Konawe Selatan		99,75		97,63		68,35
Bombana		99,78		86,15		61,09
Wakatobi		99,66		97,80		79,36
Kolaka Utara		99,70		88,87		55,37
Buton Utara		99,77		96,61		82,07
Konawe Utara		99,21		93,45		74,92
Kolaka Timur		99,03		95,13		66,87
Konawe Kepulauan		99,35		99,06		74,70
Muna Barat		99,69		87,57		80,90
Buton Tengah		91,97		97,82		94,10
Buton Selatan		99,59		96,42		49,02
Kendari		99,96		93,97		83,21
Baubau		99,82		96,95		80,51
<b>Sulawesi Tenggara</b>		<b>99,13</b>		<b>94,78</b>		<b>73,94</b>



## III

### (5) Indikator Pendidikan

Jenjang Sekolah	Murid	Guru	Sekolah
SD/MI	19502	1221	79
SMP/MTs	10242	842	34
SMA/MA	46249	3453	239



## IV

## (1) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Tahun	TPAK (%) Kota Baubau	TPT (%) Kota Baubau
(1)	(2)	(3)
2014	64,14	6,79
2015	66,40	7,17
2017	62,85	7,07
2018	67,89	5,75
2019	66,12	5,84

**IV**

**(2) Indikator Ketenagakerjaan**

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Jenis Kelamin	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (jiwa), 2019			Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Bukan Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	41 789	3 016	13 217	58 022
Perempuan	32 655	1 604	27 289	61 548
Laki-laki+ Perempuan	74 444	4 620	40 506	119 570



## IV

## (3) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian/ <i>Agriculture</i>	5 877	3 010	8 887
Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	7 521	4 750	12 271
Jasa/ <i>Service</i>	28 391	24 895	53 286
<b>Jumlah/<i>Total</i></b>	<b>41 789</b>	<b>32 655</b>	<b>74 444</b>

## IV

### (4) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Jenis Kegiatan	Tingkat Pendidikan						Total
	SD	SMP	SMA	SMK	Diploma I/II/III	Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bekerja	16 085	8 847	20 460	8 344	3 578	17 130	74 444
Pengangguran	1 080	364	1 684	369	178	945	4 620
<b>Jumlah/Total</b>	<b>17 165</b>	<b>9 211</b>	<b>22 144</b>	<b>8 713</b>	<b>3 756</b>	<b>18 075</b>	<b>79 064</b>

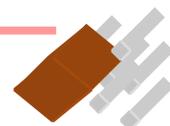


## V

## (1) Indikator Perumahan dan Lingkungan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga menurut karakteristik dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati, 2019	
	Milik Sendiri	Lainnya
(1)	(2)	(3)
Buton	85,26	14,74
Muna	89,56	10,44
Konawe	90,57	9,43
Kolaka	86,90	13,10
Konawe Selatan	93,50	6,50
Bombana	85,18	14,82
Wakatobi	92,84	7,16
Kolaka Utara	84,29	15,71
Buton Utara	94,14	5,86
Konawe Utara	90,26	9,74
Kolaka Timur	91,91	8,09
Konawe Kepulauan	96,17	3,83
Muna Barat	95,86	4,14
Buton Tengah	89,72	10,28
Buton Selatan	94,65	5,35
Kendari	66,25	33,75
Baubau	68,34	31,66
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>85,28</b>	<b>14,72</b>

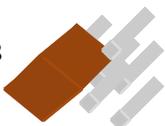


## V

## (2) Indikator Perumahan dan Lingkungan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga*) menurut karakteristik dan tempat pembuangan akhir tinja, 2019	
	Tangki septik/IPAL	Lainnya
(1)	(2)	(3)
Buton	89,23	10,77
Muna	84,86	15,14
Konawe	84,90	15,10
Kolaka	90,59	9,41
Konawe Selatan	70,61	29,39
Bombana	91,05	8,95
Wakatobi	89,00	11,00
Kolaka Utara	93,91	6,09
Buton Utara	35,52	64,48
Konawe Utara	91,96	8,04
Kolaka Timur	92,28	5,72
Konawe Kepulauan	77,64	23,36
Muna Barat	79,91	20,09
Buton Tengah	89,84	10,16
Buton Selatan	64,96	35,04
Kendari	98,04	1,96
Baubau	78,85	21,15
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>85,75</b>	<b>14,25</b>



## VII

## (1) Indikator Kemiskinan

Kabupaten/Kota	Jml Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	13,78	13,97	13,67	13,65	233 201	254 013
Muna	29,12	28,47	13,19	12,85	314 928	342 948
Konawe	33,40	31,25	13,48	12,34	283 109	293 801
Kolaka	24,74	24,00	12,51	11,92	349 388	370 036
Konawe Selatan	33,73	33,89	10,95	10,81	219 979	235 654
Bombana	19,77	19,37	11,05	10,56	288 201	308 396
Wakatobi	14,20	14,14	14,85	14,75	256 308	278 929
Kolaka Utara	21,03	19,80	14,30	13,19	453 994	454 127
Buton Utara	9,38	9,18	14,93	14,38	306 437	331 555
Konawe Utara	8,82	8,67	14,22	13,66	260 861	273 544
Kolaka Timur	25,97	26,29	13,82	13,71	345 216	369 870
Konawe Kepulauan	5,87	5,86	17,48	17,18	294 035	314 815
Muna Barat	11,39	11,52	14,17	13,84	315 009	342 811
Buton Tengah	13,72	14,64	14,88	15,77	231 289	251 702
Buton Selatan	11,86	11,81	14,82	14,66	214 859	235 847
Kendari	17,76	17,30	4,69	4,44	327 976	350 647
Baubau	12,57	12,42	7,57	7,27	311 509	329 977
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>307,10</b>	<b>302,58</b>	<b>11,63</b>	<b>11,24</b>	<b>303 618</b>	<b>327,402</b>

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://baubaukota.bps.go.id>

# SUMBER DATA

<https://baubaukota.pjs.go.id>

### SUMBER DATA

#### Sensus Penduduk

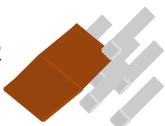
Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

#### Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

a) Konsumsi/Pengeluran



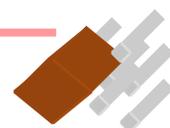
- b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

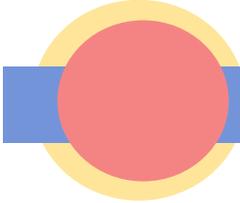
Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/madya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mitra statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga.

### **Survei Angkatan Kerja Nasional**

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara





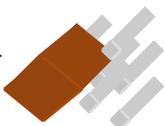
## SUMBER DATA

tahunan. Pada tahun 2005 - 2018 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005 Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2018 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.

### **Sumber Data Lainnya**

Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Kementerian/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.

<https://baubaukota.bps.go.id>







Sensus  
Penduduk  
2020



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BAUBAU**

Jl. Murhum No 52, Baubau, 93726

Telp. (0402) 2821277

homepage: <http://baubaukota.bps.go.id>

email: [bps7472@bps.go.id](mailto:bps7472@bps.go.id)